

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah (spip) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten Gorontalo utara. Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada pemerintah kabupaten Gorontalo utara tergolong pada kondisi yang cukup dengan presentase 66,9%. Dilihat dari tanggapan responden yang memperoleh skor terendah pada sistem pengendalian intern pemerintah yaitu pada dimensi lingkungan pengendalian dan 2 indikator yang terendah diantaranya adalah indikator penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM yang berkisar 22,2% dan indikator perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif yang berkisar 22,2%. Sementara yang termasuk dalam kategori baik yaitu pada dimensi kegiatan pengendalian antara lain indikator pengendalian fisik atas aset yang berkisar 55,5% dan indikator otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting yang berkisar 55,5%.
2. Kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten Gorontalo utara memperoleh presentase 65,1% dan tergolong pada kondisi yang

cukup. Adapun beberapa tanggapan dari responden yang memperoleh skor terendah pada kualitas laporan keuangan yaitu pada dimensi dapat dibandingkan dan terdiri dari indikator pembandingan masa lalu yang berkisar 27,8% dan pembandingan organisasi lain berkisar 13,9%. Adapun dimensi yang termasuk dalam kategori baik adalah pada dimensi relevan yang terdiri dari beberapa indikator yaitu indikator manfaat untuk memprediksi yang berkisar 50% dan indikator tepat waktu yang berkisar 47,3%.

3. Dari hasil pengujian hipotesis, dapat dilihat bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Ini dibuktikan dengan nilai t-hitung sebesar 2.120 lebih besar dari t-tabel 1.688 dengan nilai signifikansi sebesar 0,041 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi α 0,05 atau diatas tingkat kepercayaan $> 95\%$. Artinya dengan adanya sistem pengendalian intern pemerintah yang semakin baik maka nilai informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah akan semakin baik pula.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut.

1. Dilihat dari tanggapan responden, diharapkan sistem pengendalian intern pemerintah pada kabupaten Gorontalo utara meningkatkan lingkungan pengendaliannya khususnya pada penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM dan perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif melalui penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.
2. Perlu adanya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah, agar informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan tersebut dapat dilakukan secara internal dan eksternal melalui penerapan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun dan penerapan akuntansi yang sama.
3. Kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara untuk dapat terus meningkatkan sistem pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah khususnya pada dimensi lingkungan pengendalian agar laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dapat terus berkualitas dalam menciptakan pemerintah yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan

keuangan daerah sehingga kedepannya BPK akan memberikan predikat opini wajar tanpa pengecualian kepada pemerintah kabupaten Gorontalo utara dan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa tentang kualitas laporan keuangan pemerintah dapat mencoba melakukan penelitian selain dengan menggunakan variabel sistem pengendalian intern pemerintah. Ini dikarenakan hasil uji determinasi R^2 yaitu sebesar 0.117 atau 11.7%. Sedangkan 88.3% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian ini. Seperti variabel penerapan good governance, standar akuntansi pemerintah, kompetensi SDM, efektifitas penerapan teknologi informasi, penerapan aplikasi sistem informasi manajemen daerah, pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit.

DAFTAR PUSTAKA

- Armando, Gerry. (2013). Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangandaerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah. *Skripsi*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Indeks.
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Indeks.
- Halim, Abdul. Muhammad Iqbal. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Hindriani, Nuning. Imam Hanafi. Tjahjanulin Domai. (2012). *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran di Daerah*. Jurnal. Madiun: Universitas Brawijaya.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 1991. *Prinsip Akuntansi Indonesia 1984, Edisi Revisi*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Madjham, Anggraeni S. (2012). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara. *Skripsi*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo. Skripsi. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YPKN.
- Mahsun, Moh. Firma Sulistiyowati. Heribertus Andre Puwanugraha. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Mohamad, Fitria. (2013). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Gorontalo Utara. *Skripsi*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo

Nune, Cahyani. (2012). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di DPPKAD Kabupaten Gorontalo. *Skripsi*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

http://sumut.kemenag.go.id/file/file/PERATURANPEMERINTAH/ue_zj1347945756.pdf (Wednesday, December 04, 2013, 2:05:58 PM)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, BPKP, 2008.

Suharso, Puguh. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Bisnis*. Jakarta: PT. Indeks.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta CV.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta CV.

Suprayogi, Angga. (2010). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Skripsi*. Bandung: Universitas Pasundan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU_32_2004_Pemerintahan%20Daerah.pdf (Wednesday, February 19, 2014, 12:01:15 AM)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

<http://www.kemenag.go.id/file/dokumen/UU172003.pdf> (Wednesday, February 19, 2014, 12:06:09 AM)

Yuliani, Safrida. Nadirsyah. Usman Bakar. (2010). *Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Banda Aceh)*. Jurnal. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.